

FORMASI DAN STRUKTUR GERAKAN SOSIAL PETANI [Studi Kasus Gerakan Reklaiming/ Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan]^{*)}

Wahyudi^{**)}

Abstract

This research was conducted in Ex-Dutch Plantation Kalibakar, in the south of Malang and had objective to analyze the formation and structure of peasant movement in Kalibakar.

This research resulted understanding that peasant social movements are determined by: structural conduciveness, structural strain, growth and spread generalized belief, precipitating factors, participant activation and mobilization, social control, support of network movement, decision making arena, and social structure differentiation.

Keywords: peasants movement, peasants social movement formation, peasants social movement structure, peasants movement stages, determinant factors to movement

Pendahuluan

Gerakan sosial petani Kalibakar adalah gerakan yang dilakukan oleh para petani dari 'enam desa' (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, Baturetno, dan Bumirejo) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan status tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Belanda (secara hukum HGU tersebut baru akan berakhir tahun 2013) melalui penerapan program *land reform*. Setelah melalui perjuangan panjang yang tidak juga membuahkan hasil, maka para

^{*)} Paper ini merupakan ringkasan hasil penelitian disertasi pada tahun 2005 di Program Doktor FISIP Universitas Indonesia.

^{**)} Dosen Sosiologi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dapat dihubungi melalui e-mail: wahwahyudi@yahoo.com

petani itu memberikan 'tekanan' agar keinginan mereka dituruti melalui strategi reklamining (istilah petani) atau penjarahan (istilah perkebunan).

Gerakan petani tersebut telah di mulai sejak jaman pasca pendudukan Jepang, kemudian berlanjut pada masa agresi Belanda ke-II, era pemerintahan Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), Era Reformasi, dan bahkan hingga detik ini pun belum selesai secara tuntas. Fokus studi lapangan ini adalah gerakan petani yang terjadi sejak era Orde Baru.

Penelitian ini merumuskan periode gerakan ke dalam empat era perjuangan. Pertama, Era Jaringan Terbatas yang terjadi pada tahun 1992-1993, yang mengakibatkan terjadinya reklamining/penjarahan tanah di areal hutan 'TT' ($\pm 22,50$ ha) yang diyakini petani sebagai tanah Kas Desa Simojayan. Kedua, Era Perluasan Jaringan yang terjadi pada tahun 1996-1997, dimana mereka memperjuangkan untuk dikembalikannya kelebihan tanah di *afdeling* Petungombo serta sertifikasi atas tanah yang telah dijanjikan pemerintah. Kegagalan perjuangan petani ini berujung pada dilakukannya tindakan reklamining/penjarahan terhadap areal *afdeling* Petungombo (± 240 ha).

Ketiga, Era Puncak Jaringan yang terjadi pada tahun 1998-2000, dimana para petani Kalibakar mendapat dukungan penuh dari semua pihak di era gerakan reformasi untuk mengambil kembali tanah yang dianggapnya sebagai tanah perjuangan nenek moyang mereka. Ketika itu sekitar 94% dari luas perkebunan Kalibakar ($\pm 2.050,50$ ha) diambil kembali oleh petani. Peristiwa pada era ini juga merupakan akumulasi kekecewaan perjuangan petani yang panjang, dimana mereka berkeinginan menjadikan pedoman *land reform* sebagai strategi penyelesaian kasus status tanah dengan pihak perkebunan. Keempat, Era Deklinasi Gerakan yang terjadi pada tahun 2001-2005, dimana para petani yang masih memperjuangkan legalitas atas tanah yang sudah didapatkan ditinggalkan oleh elemen-elemen yang sebelumnya secara tegas dan formal mendukungnya.

Ketika studi ini dilakukan, peneliti mengetahui ada dua penelitian yang dilakukan di Kalibakar. Pertama yang dilakukan oleh Araf dan Puryadi (2002), menyimpulkan bahwa gerakan Kalibakar memiliki dampak positif bagi kehidupan petani. Kedua adalah studi yang dilakukan Mustain (2005), yang lebih menekankan pada pengaruh aspek kesejarahan sosial. Mustain diantaranya menyimpulkan, bahwa akar permasalahan kasus Kalibakar dimulai dari sejarah lahirnya hak

erfpacht yang kemudian dikonversi menjadi HGU pada tanah perkebunan yang dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan peruntukan, penguasaan dan pengasingan terhadap penduduk sekitar atas peran koeksistensi sehingga memicu konflik.

Kedua hasil penelitian di atas memang setidaknya telah ikut andil untuk menjelaskan fenomena Kalibakar, namun belum menjawab pertanyaan bagaimana proses dari berbagai *determinant* yang ada turut memberikan kontribusi bagi terciptanya gerakan reklamasi/penjarahan dalam setiap periode gerakan sebagaimana disinggung di atas. Atas dasar konseptual inilah, maka penelitian ini dilakukan.

Gerakan Petani dalam Perspektif Teoretik

Gerakan petani merupakan bagian dari gerakan sosial. Gerakan petani umumnya merupakan gerakan reformatif, karena mereka hanya menghendaki dilakukannya perubahan atas sebagian nilai atau norma yang ada (Aberle dalam Kamanto:2000; Kornlum:1988).

Gerakan petani dapat dikategorikan ke dalam gerakan sosial lama (*old social movement*) maupun baru (*new social movement*). Termasuk dalam klasifikasi 'lama' jika gerakannya berorientasi pada persoalan-persoalan ekonomi, dan kebutuhan materi lain (Sing: 2001; Keun: 2000; Gusfield: 1994). Namun jika gerakan tersebut berhubungan dengan nilai-nilai dan isu-isu modern seperti: HAM, keadilan, persamaan hak, lingkungan hidup, perdamaian, dll, maka disebut dengan gerakan sosial baru (Sing: 2001; Jaeyol: 2000; Tilly: 1998).

Gerakan petani biasanya berakar pada persoalan produksi komoditi, dan konflik dengan negara (Lindberg dalam Omvedt: 1994), memiliki relevansi dengan kondusivitas iklim politik (Martin dan Halpin: 1998; Haber: 1997; Tilly: 1978), didukung oleh jaringan organisasi yang misinya serupa (Rosenthal, Fungruth, dkk.: 1985), dengan tujuan meraih kepentingan bersama (Molyneux: 1998). Gerakan petani sering juga terjadi akibat dari mobilisasi personal maupun kognitif (Koen: 2000).

Dalam episode gerakan sosial tidak jarang muncul dramatisasi isu sosial. Hal ini akan membuka peluang terjadinya perubahan sosial dan ekspansi akses struktural bagi para partisipan dan anggota masyarakat lain (Harper:1989). Gerakan sosial memiliki dampak positif, baik dalam level pribadi partisipan, organisasi gerakan, komunitas

partisipan, maupun struktur makro masyarakat (Cable dan Degutis:1997).

Gerakan petani berhubungan dengan berbagai faktor, diantaranya: (1) Komersialisasi lahan pertanian (Zagoria:1974; Siahaan:1999), (2) Ketidakadilan dan penindasan yang sudah tidak bisa ditolerir, serta lonjakan biaya hidup akibat krisis ekonomi (Ekstein:1989, Hafid:2001), (3) Meluasnya peran negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau (Scott:1985), (4) Kebijakan yang tidak adil, perubahan sosial yang sangat cepat, dan kemerosotan kewibawaan pemimpin tradisional (Sharaishi:1980), (5) Ganti rugi tanah yang tidak memadai, dan munculnya isu demokrasi (Prasetyohadi, dkk.:1998), (6) Pengingkaran terhadap hak tradisional petani (Sudrajat, dan Bukhari:2000), (7) Sistem pengelolaan tanah yang hanya menguntungkan penguasa dan kroninya (Bachriadi dan Lucas:2001; Sudibyo:1999), dan (8) Model penggusuran yang tidak tepat (Majalah Dinamika Petani:1999).

Menurut Smelser (1962), manusia memasuki episode perilaku kolektif karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya. Beberapa elemen dari lingkungan sosial itu disebutnya sebagai *the important determinants of collective behavior*, yakni: kondusivitas struktural, ketegangan struktural, pertumbuhan dan penyebaran 'kepercayaan umum', faktor-faktor pemercepat, mobilisasi partisipan, dan kontrol sosial. Smelser (1962) mengembangkan konsep yang disebutnya sebagai 'value added', untuk menerangkan bagaimana proses berbagai elemen tersebut saling memberikan kontribusinya sehingga tercipta perilaku kolektif.

Peneliti melihat bahwa meskipun teori Smelser (1962) ini merupakan teori lama dan sudah banyak mendapatkan kritik, namun masih tepat digunakan untuk menganalisa fenomena gerakan reklamasi/penjarahan di Kalibakar, khususnya yang terkait dengan fenomena dari para aktornya yang berorientasi pada norma.

Apabila teori Smelser (1962) dalam *norm-oriented movements* lebih menekankan peran pentingnya norma, di sisi lain Charles Tilly (1978) dalam membicarakan model mobilisasi tindakan kolektif, lebih menekankan pada aspek *interest*. Menurut Tilly (1978), analisis terhadap aksi kolektif memiliki lima komponen besar, yakni: kepentingan (*interest*); organisasi (*well-defined groups*); mobilisasi (berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti: tanah, pekerja, kapital,

dan teknologi); peluang (politik, koalisi, persaingan); serta tindakan kolektif itu sendiri yang secara internal juga memiliki konflik kepentingan.

Charles Tilly membedakan antara situasi revolusioner (*revolutionary situation*) dan hasil yang revolusioner (*revolutionary out come*). Situasi disebut revolusioner ketika beberapa jenis tindakan kolektif yang melawan pusat kekuasaan adalah jelas. Jenis tindakan itu dapat berupa demonstrasi, kerusuhan, gerakan sosial, *revolt*, perang sipil, atau manifestasi antagonisme lain terhadap negara. Situasi revolusioner akan muncul ketika para pembangkang berhasil melakukan mobilisasi sumber-sumber finansial, organisasional, dan *coercive resources*.

Sedangkan *revolutionary out come* akan terjadi jika mobilisasi itu lebih besar daripada kemampuan negara dalam memanfaatkan kekuasaan, sumber-sumber materiil, dan sumber-sumber alternatif lain untuk mencegah mobilisasi tersebut. *Revolutionary out come* akan ditandai dengan adanya perpindahan aktual kekuasaan. Tilly menegaskan, bahwa dalam sejarah gerakan manusia situasi revolusioner lebih sering ditemukan daripada *revolutionary out come*.

Model analisis mobilisasi Tilly (1978) di atas dapat saling melengkapi dengan model yang dibangun oleh Smelser (1962) tentang bagaimana gerakan sosial petani terjadi dalam kasus Kalibakar. Alasan rasionalnya adalah Smelser (1962) tidak memberi tekanan pada *interest*, sedangkan Tilly (1978) tidak memberikan perhatian pada aspek *belief*. Padahal, kedua elemen tersebut sangat menentukan dalam peristiwa Kalibakar.

Gerakan petani sebagai salah satu jenis dari gerakan sosial, kemunculannya tidak dapat lepas dari adanya keterkaitan dengan jaringan sosial. Dari berbagai teori tentang jaringan sosial, pemikiran Sheller (2000) tentang sifat *fluidity* dari jaringan nampaknya cocok untuk melihat fenomena Kalibakar. Perspektif jaringan itu mencair mengikuti asumsi, bahwa ruang sosial (aktor di tempat tertentu menampilkan perilaku tertentu) tersebut berkarakter seperti cairan.

Pemikiran bahwa jaringan itu tidak statis melainkan dinamis, berargumen bahwa: (1) Aktor sosial secara fisik selalu bergerak melalui ruang, kapan, dan dimana mereka bertemu dengan orang lain, serta bagaimana mereka sampai di sana; (2) Gerakan sosial secara intrinsik

berhubungan dengan gerakan aktual manusia, informasi, dan jenis arus lain dalam wilayah geografi tertentu; serta (3) Jaringan dalam gerakan berkaitan dengan insentif, ideologi, emosi, peluang politik, dan aneka isu di sekitarnya.

Mengenai terbentuknya jaringan sosial, Roger Gould (2000) menyorotinya dari perspektif strukturalis dan rasionalis. Dalam perspektif strukturalis dikatakan bahwa jaringan sosial muncul karena dipengaruhi oleh konteks pola lokal atau struktur sosial. Aktor sosial terikat dalam peran khusus atau ia berada dalam kerangka kerja institusi tertentu. Bahwa perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh posisi ekonomi, sikap dan pertimbangan untung rugi saja, tetapi juga oleh “*strong social attachments*” terhadap orang lain. Sedangkan dalam perspektif rasionalis dikatakan bahwa formasi jaringan itu dipengaruhi oleh adanya *self-interest*.

Teori jaringan yang dipergunakan dalam studi ini adalah yang dapat menerangkan tentang bagaimana proses terciptanya struktur jaringan itu. Tepatnya tentang pertimbangan atau motif yang dipergunakan oleh aktor untuk masuk, berada, dan keluar dari jaringan gerakan. Beberapa pertimbangan atau motif yang sudah ditemukan dalam temuan terdahulu misalnya tentang: peran komitmen aktor (Cook's dan Kollock, serta Lawler dan Yoon dalam Turner:1998), kalkulasi rasional tentang *cost* and *benefit* dalam teori pertukaran (Turner:1991), pertimbangan *self interest* (Gould:2000), dan peran emosi sebagai perekat (Markovsky dan Lawlers dalam Ritzer:2000).

Periodisasi Gerakan Petani Kalibakar, Malang Selatan

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluan, maka sajian ringkasan hasil penelitian ini akan disampaikan dalam empat kerangka formasi dan struktur gerakan, yakni pada era jaringan terbatas, era perluasan jaringan, era puncak jaringan, dan era deklinasi jaringan.

1. Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani di Era Jaringan Terbatas

Semenjak Orde Baru, gerakan reklamasi/penjarahan telah dilakukan petani Kalibakar pada tahun 1992 – 1993. Dalam periode ini, gerakan petani lebih bersumber dari inisiatif seorang pemimpin sentral petani yang kemudian mendapatkan dukungan dari kalangan internal petani, serta sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan

underbow dari partai politik yang sangat berpengaruh ketika itu. Oleh karena gerakan petani hanya mendapatkan dukungan dari sebuah organisasi sosial saja, maka disebut dengan era jaringan terbatas.

Gerakan petani yang berupa tindakan reklamasi/penjarahan kala itu disebabkan oleh dua faktor, yakni terkait dengan status tanah, dan pencurian atau penebangan hutan. Terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat, khususnya masyarakat petani dan pihak perkebunan tentang status tanah hutan TT. Menurut masyarakat, hutan TT adalah hutan *titi soro*, yakni hutan lindung milik desa yang di jaman penjajahan (jaman Belanda dan Jepang) dahulu oleh masyarakat dijadikan daerah basis perjuangan. Sementara itu, pihak perkebunan mengaku bahwa apa yang disebut dengan hutan TT oleh petani, sesungguhnya adalah Petak T yang dikelola dan difungsikan sebagai hutan lindung. Konflik status tanah ini tidak dapat diselesaikan secara baik-baik.

Penyebab kedua adalah berkembangnya isu, bahwa pihak perkebunan telah membiarkan terjadinya pencurian atau penebangan hutan di kawasan hutan TT. Masyarakat terbakar hatinya mendengar dan melihat fenomena tersebut. Sementara itu, perkebunan berpendapat berbeda, bahwa tidak pernah terjadi penebangan atau pencurian kayu di hutan TT. Menurut perkebunan, semua itu hanya isu untuk menghasut petani agar marah, lalu menjarah hutan. Apa yang terjadi pada tahun 1992 di Petungombo tersebut, ternyata merupakan *starting point* bagi terjadinya serangkaian tindakan reklamasi/penjarahan di kawasan Kalibakar pada tahun-tahun berikutnya.

Formasi atau proses terbentuknya gerakan reklamasi/penjarahan terhadap areal hutan TT disebabkan oleh adanya *land dispute* antara petani dan perkebunan (PTPN XII Kalibakar). Pada saat itu kehidupan masyarakat petani secara ekonomi masih di bawah standar, dikarenakan tidak adanya lahan garapan pertanian. Sementara sengketa status tanah belum terselesaikan, para petani yang secara ekonomi kehidupannya masih di bawah standar, melihat dan mendengar isu tentang adanya oknum yang melakukan tindakan kriminalitas penebangan atau pencurian di areal hutan TT. Memperhatikan fenomena sosial dan kriminalitas semacam itu, maka pemimpin sentral petani menggagas apa yang kemudian disebut dengan Program Pertanian Rakyat Bersama (P2RB).

Selanjutnya tentang struktur jaringan gerakan, sebagaimana dijelaskan di atas, para aktor gerakan petani di era jaringan terbatas

terdiri dari: (1) Pemimpin sentral petani, (2) Petani pendukung gerakan, dan (3) Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan. Menurut temuan penelitian di lapangan, awal dukungan dari suatu organisasi yang berafiliasi ke partai politik itu tidak didasarkan atas motif ekonomi melainkan lebih didasarkan atas pertimbangan emosi agar petani Simojayan betul-betul bisa mendapatkan kembali hak-hak atas tanahnya sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Namun demikian, dalam perjalanan waktu, motif-motif para aktor pendukung itu mengalami pergeseran, yakni bukan hanya karena ingin membantu petani saja tetapi mereka pun menginginkan adanya keuntungan yang dapat diambilnya.

2. Gerakan Sosial Petani di Era Perluasan Jaringan

Era perluasan jaringan terjadi antara tahun 1996–1997, dimana gerakan petani Kalibakar mulai mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai kalangan agar mereka meneruskan perjuangannya untuk *mereklaim* tanah perkebunan. Formasi dalam era ini memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Perbedaannya terletak pada jumlah aktor pendukungnya yang lebih banyak, serta area gerakan yang lebih luas. Sedangkan akar gerakan sosialnya masih mirip yakni pertarungan perspektif legalitas hukum formal yang dimiliki perkebunan versus perspektif legalitas sosial atas dasar *oral history* yang diyakini masyarakat petani.

Selain dua faktor di atas, formasi gerakan reklamings juga ditentukan oleh aspek: (1) Perilaku sosial pegawai perkebunan yang menurut warga kurang sensitif terhadap lingkungan, (2) Model pengelolaan perkebunan yang lebih cenderung murni *bussines oriented*, sementara rakyat lebih berharap dapat dikembangkannya model yang mengakomodir kebutuhan sosial, *corporate social responsibility*-nya kental, serta (3) Kegagalan kontrol sosial dalam membendung derasnya gelombang tekad reklamings/penjarahan masyarakat petani.

Struktur jaringan gerakan di era perluasan jaringan berbasis dari pola yang pernah terjadi di era tahun 1992-1993. Pemimpin sentral petani tetap menjadi figur utama yang mengendalikan para aktor yang melibatkan diri ke dalam struktur, serta bagaimana gerakan petani harus dilakukan. Dalam era ini, gerakan petani mendapatkan dukungan dari sosok yang berpengaruh dari luar petani, yakni eks tentara gerilya yang basis perjuangannya dahulu di kawasan Kalibakar. Sosok inilah yang

membantu perluasan struktur jaringan sehingga gerakan petani mendapat dukungan baik secara terbuka maupun tertutup dari birokrasi pusat, maupun daerah. Pelibatan diri eks tentara gerilya ini seakan memberi darah segar bagi gerakan petani.

3. Gerakan Sosial Petani Kalibakar di Era Puncak Jaringan

Era puncak jaringan gerakan sosial petani terjadi antara tahun 1998 – 2000. Dalam catatan sejarah Indonesia, tahun 1998 merupakan tonggak sejarah reformasi. Era reformasi telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi terjadinya tindakan reklamasi/penjarahan Kalibakar. Ketika itu, semua komponen masyarakat, birokrasi, LSM, partai politik, maupun alat pertahanan keamanan Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya pada gerakan petani Malang Selatan. Semua pihak yang berada di bawah Tim Penyelesaian Kasus Kalibakar telah secara resmi meminta kepada kementerian agraria untuk meredistribusikan lahan perkebunan Kalibakar kepada petani. Sebaliknya, pihak perkebunan berjuang sendiri untuk mempertahankan lebih dari 2.000 hektar lahan yang ditanami pohon coklat yang kualitasnya termasuk terbaik di dunia.

Dalam era puncak jaringan, struktur jaringan semakin luas karena didukung oleh banyak elemen yang memiliki kepentingan dalam arena gerakan petani Kalibakar. Struktur gerakan sosial petani dalam era ini berbasis jaringan terdahulu (tahun 1992-1993 dan tahun 1996-1997). Jaringan gerakan selain berisi aktor-aktor seperti: pemimpin sentral petani, organisasi petani lokal maupun regional, organisasi sosial kemasyarakatan, eks tentara gerilya, birokrasi pusat dan daerah, juga diperkuat dengan bergabungnya LSM, LBH, mahasiswa aktivis, tokoh agama nasional maupun lokal, partai politik, alat pertahanan keamanan, juga para *free riders*. Pada era ini gerakan petani berada di atas angin. Para petani tidak merasa takut sama sekali untuk melakukan reklamasi/penjarahan di sepanjang hari.

4. Era Deklinasi Gerakan Petani

Era deklinasi gerakan petani Kalibakar terjadi paska tahun 2001. Pergantian pemerintah pusat sampai dengan daerah yang tidak pro-perjuangan petani dianggap sebagai penyebab utama. Perkembangan semacam ini secara otomatis telah menghilangkan faktor dukungan politik terhadap gerakan petani Kalibakar. Pada sisi lain, baik LSM, LBH, maupun mahasiswa aktivis juga mulai kehabisan energi.

Akhirnya petani berjuang sendiri kembali. Petani hanya ditemani oleh organisasinya yang bernama Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas).

Forkotmas akhirnya menjadi satu-satunya *back bone* bagi gerakan petani. Organisasi ini pula yang sampai saat ini masih setia menemani upaya mobilisasi dan penguatan persatuan kesatuan petani. Salah satu cara yang dipakai oleh Forkotmas untuk mempererat persatuan petani adalah dengan cara mengajak semua yang hadir dalam forum pertemuan membaca sumpah petani yang berbunyi:

- (1) Kami Petani Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berfalsafah Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945;
- (2) Kami Petani Indonesia, setia dan berbakti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Kami Petani Indonesia, siap dan bertanggung jawab mempertahankan sejenkal tanah dan seluruh isinya;
- (4) Kami Petani Indonesia, siap berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan harkat manusia dan nilai nilai petani Indonesia;
- (5) Kami Petani Indonesia, jujur, bijaksana, berani, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa deklinasi gerakan petani Kalibakar terjadi karena dipengaruhi oleh suasana politik yang tidak kondusif, sehingga para aktor pendukung satu demi satu mundur secara teratur. Perkembangan ini akhirnya juga berpengaruh terhadap struktur gerakan petani. Perjuangan petani hanya ditemani oleh Forkotmas dan Paguyuban Petani Jawa Timur yang dalam percaturan politik sudah tidak lagi menjadi *bargaining position* yang kuat. Atas dasar perkembangan semacam ini, akhirnya perjuangan petani menjadi setengah jalan. Secara *de facto* lahan eks perkebunan berada dalam penguasaan petani, namun secara *de jure* petani belum memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang ada.

Analisa Hasil Penelitian

Tradisi teoretik yang dipergunakan untuk membahas hasil penelitian ini adalah teori perilaku kolektif (*theory of collective behavior*) dari Neil J. Smelser (1962) dan model mobilisasi tindakan kolektif dari Charles Tilly (1978). Kedua kerangka teoretik ini akan dikombinasikan untuk melihat kasus Kalibakar, karena menurut temuan lapangan diketahui bahwa para aktornya ada yang berorientasi pada

norma, yaitu *land reform* (untuk kepentingan bersama petani) dan ada pula yang berkepentingan untuk mengejar *self interest* yang berupa kekuasaan sosial dan politik (*social and political power*). Paparan kajian teori tersebut akan disampaikan mulai dari Teori Smelser (1962) baru kemudian diikuti oleh Teori Tilly (1978).

1. Kondusifitas Struktural

Menurut Smelser (1962), proses terjadinya perilaku kolektif itu dimulai dari adanya persoalan dalam struktur sosial. Kondusifitas struktural ini merupakan embrio yang membuka peluang bagi terjadinya perilaku kolektif. Dalam temuan lapangan diketahui, bahwa ada serangkaian kondisi struktural Kalibakar yang memang dapat menjadi dasar terjadinya perilaku kolektif.

Secara umum kondisi struktural itu berkaitan dengan: (1) Meningkatnya kontak dan komunikasi petani dengan orang-orang di luar petani yang memiliki strata yang berbeda, (2) Sistem kekerabatan yang patrilineal, (3) Sistem sosial yang paternalistik, (4) Struktur mata pencaharian yang mayoritas petani dan buruh tani, (5) Struktur pendidikan yang mayoritas tamat SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat, (6) Struktur politik yang berpusat pada pemerintah desa, (7) Tidak adanya model penataan perkebunan dan lokasi hunian penduduk yang baik, serta, (8) Model kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada 'sosialisme', sehingga bertentangan dengan model pengelolaan perkebunan yang *profit* atau *bussines oriented*.

Selain kondisi struktur umum tersebut, terdapat pula kondisi-kondisi khusus yang melekat pada masing-masing periode gerakan. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) kondisi itu misalnya: kristalisasi ide Program Pertanian Rakyat Bersama (P2RB) yang didukung oleh pemerintahan desa dan adanya dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) yang berafiliasi ke partai politik besar ketika itu. Pada era perluasan jaringan (1996-1997) kondisi itu berupa: meluasnya dukungan kepada petani dari para eks-pelaku sejarah perjuangan di Kalibakar, dan gagalnya proses sertifikasi.

Sedangkan pada era puncak jaringan (1998-2000) kondisi khusus itu berupa: bergulirnya era reformasi yang menciptakan euforia politik dan adanya *vacuum of power*, sehingga penegakkan hukum dan keamanan kurang efektif. Sementara itu pada era deklinasi gerakan

(2001-2005), para petani Kalibakar tidak lagi mendapatkan dukungan yang penuh.

2. Ketegangan Struktural

Penentu bagi terjadinya perilaku kolektif yang kedua menurut Smelser (1962) adalah terciptanya ketegangan struktural. Menurut temuan lapangan diketahui bahwa secara umum ketegangan itu dipengaruhi oleh tidak pernah selesainya persoalan *land dispute* antara petani dengan pihak perkebunan. Padahal perjuangan penyelesaian itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Sementara itu ketegangan yang terjadi di era jaringan terbatas adalah berupa: terciptanya deprivasi ekonomi relatif di kalangan petani, adanya ketidak-senangan petani terhadap pihak perkebunan, serta fenomena klaim versus reklamasi antara petani dan perkebunan atas areal hutan 'TT' (hutan *titi soro*, hutan lindung yang dianggap milik desa, bukan milik Perhutani).

Elemen ketegangan yang terjadi pada era perluasan jaringan (1996-1997) adalah berupa emosi petani yang tidak terkendali atas kegagalan proses sertifikasi. Sedangkan ketegangan yang terjadi pada era puncak jaringan (1998-2000) adalah berupa proses penularan dari peristiwa Simojayan terhadap seluruh petani di Kalibakar. *Contagion process* ini diperkuat dengan bergulirnya gerakan reformasi. Sementara itu, ketegangan pada era deklinasi gerakan (2001-2005) adalah mulai hilangnya dukungan terhadap perjuangan petani Kalibakar.

3. Tumbuh dan Menyebarnya Kepercayaan Umum

Aspek ketiga dalam proses terjadinya perilaku kolektif menurut Smelser (1962) adalah tumbuh dan menyebarnya kepercayaan umum yang terkait dengan persoalan yang sedang berkembang. Secara umum, *belief* yang tumbuh dan berkembang di kalangan petani Kalibakar adalah bahwa tanah eks HGU perkebunan Belanda itu adalah hak sah petani atas jasa perjuangan nenek moyang mereka.

Sementara itu, *belief* yang berkembang di era jaringan terbatas (1992-1993) adalah berupa: (1) Keyakinan petani bahwa areal hutan 'TT' merupakan tanah khas desa sehingga mereka memiliki hak untuk membuat keputusan penggunaan tanah tersebut, (2) Keyakinan bahwa reklamasi/penjarahan merupakan strategi terbaik yang dapat dilakukan.

Pilihan ini merupakan pilihan terakhir karena cara-cara prosedural yang sudah ditempuh tidak membuahkan hasil.

Kepercayaan umum yang ada pada era perluasan jaringan (1996-1997) adalah berupa: (1) Keyakinan bahwa petani memiliki kelebihan tanah sekitar 160 ha di *afdeling* Petungombo, karena itu mereka berhak atas tanah tersebut, (2) Keyakinan bahwa reklamining/ penjarahan adalah cara terakhir yang terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan perkebunan.

Kepercayaan umum yang ada pada era puncak jaringan (1998-2000) adalah berupa: (1) Keyakinan bahwa era reformasi merupakan saat yang paling tepat untuk mengambil kembali seluruh tanah yang pernah diambil oleh perkebunan, dan (2) Keyakinan bahwa hanya melalui reklamining/ penjarahan saja petani dapat mencapai tujuan itu.

Sedangkan kepercayaan umum yang ada pada era deklinasi gerakan (2001-2005) adalah berupa: (1) Keyakinan bahwa mereka berhak mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah diduduki, (2) Keyakinan bahwa pemerintah tidak akan mengambil kembali tanah yang sudah mereka pergunakan untuk kepentingan pertanian itu.

4. Faktor Pemercepat

Penentu penting ke-empat dari perilaku kolektif menurut Smelser (1962) adalah faktor pemercepat. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) faktor pemercepat itu berupa: (1) Disetujuinya ide P2RB oleh pemerintah desa, (2) Adanya dukungan ormas, dan (3) Terjadinya pencurian pohon-pohon lindung di hutan "TT" oleh orang-orang di luar petani. Faktor pemercepat pada era perluasan jaringan (1996-1997) adalah berupa kegagalan proses sertifikasi tanah, sementara itu petani sudah berkorban uang untuk kegiatan tersebut.

Sedangkan faktor pemercepat pada era puncak jaringan (1998-2000) berupa bergulirnya era reformasi, sehingga diantara dampaknya adalah terciptanya euforia politik di kalangan petani. Dalam era deklinasi tentu saja tidak ada faktor pemercepat gerakan. Justru yang terjadi adalah penghambat upaya petani untuk diterapkannya program *land reform* secara resmi oleh pemerintah. Dampak dari kondisi ini adalah ketidak-jelasan program sertifikasi atas tanah yang sudah diduduki oleh petani.

Jika kemudian dihubungkan dengan konsep Tilly (1978), maka dapat dikatakan bahwa faktor pemercepat tersebut ikut serta menciptakan peluang bagi terjadinya tindakan kolektif. Melalui penjelasan di atas, diketahui bahwa peluang yang ada adalah berupa: koalisi dengan ormas, koalisi dengan kekuasaan, relasi antara pemimpin petani dengan pejabat tertentu di institusi kekuasaan, dan terciptanya kondusifitas iklim politik.

5. Mobilisasi Partisipan

Aspek kelima yang turut menentukan perilaku kolektif menurut Smelser (1962) adalah mobilisasi partisipan. Aspek mobilisasi sebagai penentu penting dalam tindakan kolektif ini juga merupakan bagian dari pemikiran Tilly (1978). Dalam hal ini Tilly (1978) benar, bahwa mobilisasi itu dapat terkait dengan aspek produksi yang berupa tanah. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) strategi mobilisasi yang ditempuh berupa: (1) Meyakinkan kepada petani bahwa areal hutan 'TT' itu tanah kas desa, (2) Mengajak petani mengoptimalkan tanah tersebut untuk kepentingan bersama petani, bukan untuk kepentingan individual, (3) Meyakinkan petani bahwa mereka punya hak atas tanah tersebut, dan dapat diambil dengan cara reklamasi, (4) Memperkuat basis dukungan yang sudah didapat dari ormas, dan (5) Mengajak petani dengan seluruh keluarganya untuk ikut melakukan reklamasi.

Strategi mobilisasi para era perluasan jaringan (1996-1997) berupa: (1) Meyakinkan petani bahwa mereka berhak mendapatkan sertifikat hak milik atas kelebihan tanah yang ada di *afdeling* Petungombo, (2) Mengumpulkan uang secara sukarela untuk mendukung program sertifikasi, (3) Memperkuat dan memperluas jaringan dukungan, baik ke pemerintah lokal maupun ke pusat, dan (4) Mengajak petani berikut keluarganya melakukan reklamasi terhadap areal *afdeling* Petungombo.

Strategi mobilisasi pada era puncak jaringan (1998-2000) adalah berupa: (1) Mengajak petani untuk memanfaatkan situasi gerakan reformasi, (2) Menerima pihak manapun sebagai anggota jaringan gerakan untuk mendukung perjuangan petani, dan (3) Mengajak petani berikut keluarganya untuk melakukan reklamasi terhadap seluruh areal perkebunan Kalibakar. Sementara itu pada era deklinasi gerakan (2001-2005), strategi mobilisasi yang dilakukan berupa: (1) Memantapkan sikap petani atas tanah yang sudah

didudukinya, dan (2) Melakukan lobi dan tekanan kepada pemerintah agar mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah didayagunakan secara efektif oleh petani.

6. Kontrol Sosial

Penentu penting dalam perilaku kolektif yang keenam adalah berupa pelaksanaan kontrol sosial. Aspek ini oleh Tilly (1978) disebut dengan istilah represi atau fasilitasi. Menurut Smelser (1962), kontrol sosial ini bisa dilakukan pada saat akan terjadi perilaku kolektif maupun pada saat peristiwa itu sedang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa kontrol sosial terhadap tindakan reklamasi/penjarahan di Kalibakar dalam seluruh periode tidak berlangsung secara efektif. Ketidakefektifan kontrol sosial ini pula yang membuka peluang bagi terjadinya tindakan kolektif tersebut. Dalam kasus Kalibakar, analisa Tilly (1978) juga tepat ketika ia melihat bahwa ketidakefektifan represi, koalisi antara *contender* dengan kekuasaan, dan situasi krisis yang dialami negara akan turut memperlebar peluang bagi terjadinya tindakan kolektif. Kondisi ini dapat terjadi karena kekuasaan akan berada dalam posisi yang lemah.

7. Dukungan Jaringan Gerakan

Selanjutnya, studi Kalibakar ini juga menemukan elemen penentu lain yang tidak disinggung baik oleh Smelser (1962) maupun oleh Tilly (1978), yakni dukungan jaringan dalam proses terjadinya perilaku kolektif. Peneliti melihat, justru unsur ini sangat menentukan berlangsung tidaknya perilaku kolektif di Kalibakar. Salah satu buktinya adalah apa yang terjadi di era deklinasi gerakan (2001-2005), yakni ketika petani kehilangan dukungan jaringan maka ketika itu pula perjuangan mereka tidak berjalan.

Pada era jaringan terbatas (1992-1993) dukungan jaringan petani berasal dari salah satu ormas yang berafiliasi ke partai politik besar ketika itu. Pada era perluasan jaringan (1996-1997) dukungan jaringan berasal dari jaringan tahun 1992-1993 ditambah dengan orang-orang pelaku sejarah redistribusi tanah di jaman agresi Belanda ke-II. Bersama orang-orang eks pelaku sejarah itulah petani dapat menggandeng jaringan ke institusi kekuasaan, baik lokal maupun nasional.

Pada era puncak jaringan (1998-2000) dukungan jaringan berasal dari seluruh organisasi politik maupun non politik yang berada di Malang, serta para aktivis gerakan yang memiliki visi yang sama dengan perjuangan petani. Sedangkan pada era deklinasi gerakan (2001-2005), dukungan jaringan petani mulai melemah, bahkan boleh dikatakan menghilang. Perjuangan mereka hanya mengandalkan organisasi petani yang dibuat oleh mereka saja. Mundurnya dukungan jaringan ini lebih dikarenakan oleh tidak adanya dukungan iklim politik sebagaimana pernah terjadi di era sebelumnya.

Meminjam pemikiran Tilly (1978), maka di dalam jaringan tersebut dapat berupa organisasi, baik organisasi internal petani, maupun organisasi eksternal petani, serta para aktivis atau pun *free-riders*. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) maupun pada era perluasan jaringan (1996-1997), organisasi yang menggerakkan petani bukanlah *well defined group's* sebagaimana dipikirkan Tilly (1978), namun diwakili oleh organisasi pemerintahan desa yang sepenuhnya simpatik pada perjuangan petani. Organisasi petani dalam makna yang sudah *well defined* baru ada sejak tahun 1998.

8. Arena Pengambilan Kesempatan

Aspek lain yang terpenting menurut Tilly (1978) adalah *interest*. Penelitian ini melihat, bahwa ternyata tidak semua orang yang terlibat dalam gerakan sosial petani itu semuanya berorientasi pada upaya diterapkannya norma *land reform*. Rupanya, upaya *berorientasi pada norma* tersebut lebih dimiliki oleh para pemimpin gerakan petani, kalangan LSM, dan aktivis mahasiswa. Mereka itulah yang dapat disebut sebagai aktor yang idealis. Sedangkan para petani biasa, yang berstatus sebagai pengikut gerakan, orientasinya lebih pada *land property* saja. Mereka ini dapat disebut sebagai aktor yang bertipe materialis atau pragmatis. Tipe aktor lain yang ditemukan adalah aktor yang *opportunis*, yakni orang-orang yang pandai memanfaatkan kepentingan untuk dirinya sendiri sambil menolong orang lain. Peneliti menyebutnya sebagai fenomena *lord bountiful oriented*, yaitu para tuan, atau pejabat, atau penguasa yang bermaksud menjadi 'dermawan' atau orang yang berjasa secara politik dalam kasus Kalibakar. Dengan demikian gerakan sosial petani dapat dipahami sebagai arena pengambilan kesempatan (*taking chance or seeking opportunity*) bagi masing-masing aktor atas dasar interestnya masing-masing.

Penelitian Kalibakar ini menemukan data, bahwa pertimbangan atau keputusan aktor untuk masuk ke dalam jaringan itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, adalah faktor kondusivitas sistem sosial politik. Kedua, faktor subyektivitas aktor, yang dapat berupa nilai tentang ideologi tertentu, dan penilaian terhadap peristiwa sosial tertentu. Ketiga, faktor kemampuan dari kedua belah pihak, khususnya pihak yang memerlukan dukungan jaringan dalam mengembangkan hubungan komunikasi yang efektif.

9. Diferensiasi Struktur Sosial

Gerakan reklamings/penjarahan yang terjadi di Kalibakar, jika dilihat dari perspektif teori modernisasi adalah merupakan konsekuensi dari dinamika perubahan sosial yang secara evolutif dan bertahap senantiasa bergerak untuk membawa kondisi masyarakat pada tingkat kehidupan yang lebih baik/modern. Meminjam kerangka pemikiran Neil J. Smelser, maka kasus Kalibakar dapat dikatakan sebagai bagian dari proses diferensiasi struktur masyarakat. Sebagai masyarakat yang terus berkembang, struktur makro Kalibakar tidak dapat menjalankan seluruh tugas fungsional yang dibebankan pada sistemnya, sehingga diperlukan diferensiasi struktur baru untuk menjawab kebutuhan perubahan menjadi bagian dari sistem masyarakat modern itu.

Struktur gerakan reklamings/penjarahan, atau tepatnya organisasi yang sengaja dibentuk untuk meraih tujuan gerakan adalah merupakan sub-struktur dari struktur Kalibakar itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan petani itu sesungguhnya telah mengambil alih fungsi yang sebelumnya seharusnya merupakan fungsi dari sistem makro masyarakat Kalibakar. Namun karena masyarakat terus berubah dari tradisional menuju modern, maka membawa konsekuensi terjadinya diferensiasi struktur tersebut.

Selanjutnya, melihat hubungan antara para aktor dengan struktur gerakan petani ketika itu. Untuk menjelaskan hubungan ini, peneliti meminjam strategi Smelser ketika ia memaparkan analisa tentang *individual attitudes toward the components of social action*. Melalui pendekatan ini dapat diketahui, bahwa tindakan sosial aktor itu terkait dengan empat komponen dasar tindakan, yakni: nilai-nilai, norma-norma, mobilisasi energi aktor, dan ketersediaan fasilitas situasional.

Smelser tidak memfokuskan pada motif individu, tetapi lebih pada peran individu di dalam struktur tindakan. Peran tersebut diaktualisasikan dalam proses relasi sosial yang diatur oleh struktur yang ada. Pertanyaannya kemudian adalah proses apa yang dialami oleh individu itu sehingga mereka mempercayai dan menyepakati nilai dan norma yang ada dalam sistem tindakan itu.

Penelitian ini melihat, sebagaimana ditegaskan oleh Parsons --- pikiran ini juga dikembangkan oleh Smelser ---, bahwa di dalam struktur tindakan akan ada proses internalisasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk memelihara integrasi dari pola nilai yang ada. Bahwa internalisasi nilai itu merupakan akibat dari proses sosialisasi sampai akhirnya nilai dan norma itu menjadi bagian dari 'kesadaran' individu atau aktor itu sendiri. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, para aktor sebenarnya juga sudah mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan.

Temuan Teoretik

Berdasarkan temuan lapangan dan analisa teoretik sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini membawa peneliti berada pada posisi sebagai Smelselian sekaligus juga Tillyian. Artinya secara umum, hasil studi ini sejalan dan mendukung pemikiran kedua teoritis tersebut. Namun secara khusus riset ini juga menemukan konsep-konsep pokok yang berbeda, dan barangkali temuan inilah yang menjadi kekhasan sosiologi gerakan sosial petani Indonesia.

Pada bagian bawah ini akan ditekankan untuk mengulas temuan teoretik Smelselian-Tillyian yang tidak sejalan dengan pemikiran Smelser dan Tilly. Adapun temuan yang dimaksud meliputi: (1) Adanya hukum aktivasi dan kontrol sosial dalam setiap fase perkembangan perilaku kolektif, (2) Pentingnya menempatkan *networking* ke dalam bagian dari *the main* atau *the important determinants* tindakan atau perilaku kolektif, dan (3) Model gerakan sosial yang merupakan hasil konvergensi dari teori Smelser (1962) dan Tilly (1978). Berikut ini temuan itu akan diulas secara singkat.

1. Hukum Aktivasi

Aktivasi adalah proses mengaktifkan *the important determinants of collective behavior*, baik yang berada di dalam sistem nilai atau pengetahuan manusia, maupun yang berada di dalam sistem

kemasyarakatan, sehingga *determinants* tersebut memiliki makna (*meaning*) yang mendukung bagi terjadinya perilaku kolektif. Aktivasi tersebut dapat dilakukan secara alamiah, yakni melalui proses pergaulan keseharian, atau melalui upaya yang terorganisir. Jaringan pendukung gerakan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses aktivasi.

Pengertian aktivasi di sini berbeda dengan batasan tentang mobilisasi partisipan sebagaimana dikemukakan oleh Smelser maupun oleh Tilly. Peneliti melihat, bahwa tanpa aktivasi maka keberadaan dari *the important determinants of collective behavior* itu akan tidak memiliki arti atau makna. Artinya, tanpa adanya aktivasi maka eksistensi dari sesuatu substansi itu tidak akan memiliki fungsi atas keberadaannya. Dengan aktivasi, akhirnya keberadaan sesuatu *determinants* akan memiliki fungsi untuk memberikan nilai tambahnya bagi sesuatu *determinants* yang lain.

Smelser maupun Tilly tidak menyinggung konsep aktivasi ini. Padahal menurut peneliti konsep ini sudah ada sejak dalam tahap awal proses yang akan menuju ke terjadinya perilaku kolektif. Dalam kaitan ini, Smelser memang berbicara tentang fungsi komunikasi dalam proses perilaku kolektif. Tetapi menurut peneliti fungsi komunikasi yang dimaksud adalah berbeda dengan konsep aktivasi yang ditemukan dalam studi ini. Jika kedua konsep ini harus diposisikan, maka menurut peneliti, bahwa aktivasi itu merupakan proses pengaktifan *determinants* sehingga memiliki makna atau arti mendalam sehingga bisa mendorong terjadinya perilaku kolektif. Sedangkan komunikasi adalah merupakan alat yang dapat dipakai di dalam aktivasi itu.

2. Hukum Kontrol Sosial

Selanjutnya tentang kontrol sosial. Smelser menyebutkan bahwa kontrol sosial itu bisa dilakukan untuk meminimalisasi kondusifitas dan ketegangan, serta untuk mengontrol perilaku kolektif yang sedang berlangsung. Peran kontrol sosial dapat dilakukan, baik oleh lembaga agensi kontrol sosial pemerintah maupun oleh masyarakat yang tidak menyetujui bagi terjadinya suatu perilaku kolektif. Dalam konsep Tilly (1978), kontrol sosial itu disebut dengan represi.

Menurut peneliti, teori Smelser maupun Tilly tersebut kurang lengkap. Karena berdasar studi lapangan ini diketahui, bahwa kontrol sosial itu selalu ada menyertai keberadaan aktivasi. Setiap ada aktivasi,

maka akan ada kontrol sosial, tidak peduli perilaku kolektif itu sedang berada pada tahap yang mana. Keberadaan aktivasi dan kontrol sosial itu mirip dengan keberadaan *push and pull factors* dalam hukum migrasi. Hukum aktivasi dan kontrol sosial itu juga dapat diumpamakan dalam hukum mekanika, dimana setiap ada daya dorong pasti diikuti oleh adanya daya tolak (misal daya gesek). Rasionalitas dari hasil studi ini adalah bahwa setiap ada gangguan terhadap stabilitas atau keamanan sistem, maka pasti akan ada reaksi yang dilakukan untuk menciptakan kembali *social order*.

3. Dukungan Jaringan Gerakan

Smelser (1962) maupun Tilly (1978) tidak menyinggung sama sekali tentang posisi dukungan jaringan dalam *the important determinants of collective behavior*. Sementara itu, menurut peneliti, dukungan jaringan adalah merupakan salah satu *determinants* yang sama pentingnya dengan elemen-elemen yang telah disebutkan oleh Smelser. Tanpa dukungan jaringan, peneliti melihat bahwa perilaku kolektif yang berorientasi pada norma tidak akan dapat berlangsung.

Kenapa tanpa dukungan jaringan gerakan orientasi norma tidak dapat berjalan? Hal ini disebabkan, bahwa setiap gerakan sosial pasti akan menghadapi tantangan atau hambatan dari pihak-pihak yang tidak setuju pada gerakan sosial itu. Jika norma yang ingin dirubah atau diterapkan itu berada dalam posisi yang semakin bertentangan dengan norma lama atau norma yang sedang berlaku, maka semakin besar kebutuhannya untuk mendapatkan dukungan jaringan. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran dukungan jaringan itu ikut memberikan nilai tambah bagi proses perilaku kolektif.

Serangkaian temuan teoretik di atas, mengisyaratkan dapat dilakukannya konvergensi teori Smelser (1962) dengan teori Tilly (1978) dalam memahami penentu-penentu penting dalam terjadinya tindakan perilaku kolektif. Hasil konvergensi tersebut dapat dilihat di bagian akhir ringkasan ini. Skema tersebut diantaranya menjelaskan, bahwa dalam suatu tindakan perilaku kolektif sangat mungkin para aktornya memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini bisa dikatakan, bahwa para aktor itu sama-sama memiliki kepentingan, tetapi tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Oleh sebab itu, prinsip yang menyebutkan bahwa gerakan sosial itu terjadi karena para aktornya ingin mengejar kepentingan bersama perlu ditinjau ulang. Barangkali

yang benar adalah bersama-sama mengejar kepentingan, dan bukan mengejar kepentingan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan kerangka teori yang ada, diketahui bahwa formasi dan struktur gerakan sosial petani Kalibakar ditentukan oleh aspek-aspek: (1) Kondusifitas struktural, (2) Ketegangan struktural, (3) Tumbuh dan berkembangnya kepercayaan umum (*generalized belief*), (4) Aktivasi dan mobilisasi partisipasi, (5) Kontrol sosial, (6) Dukungan jaringan dukungan (organisasi dalam, *free rider*, dan organisasi luar), (7) Arena pengambilan kesempatan untuk merealisasi interest aktor, dan (8) Diferensiasi struktur sosial. Teori yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari teori sosiologi makro yang menaruh perhatian pada aksi atau perilaku kolektif dari suatu gerakan sosial petani. Formasi dan Struktur gerakan sosial tersebut menghasilkan model sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran.

Daftar Pustaka

Buku:

- Araf dan Puryadi, 2002, *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Bachriadi, Dianto dan Lucas, Anton, 2001, *Perlawanan Petani dalam Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John W, 1994, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks California: SAGE Publications.
- Eckstein, Susan (1989), *Power and Populer Protest, Latin America Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Hafid, 2001, *Perlawanan Petani, Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: LSPP Latin.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo, 2002, *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Yayasan Genteng Budaya.
- Larana, Johnston, Gusfield, 1994, *New Social Movements: from Ideology to Identity*. Temple University Press.

- Nagazumi, Akira, 1988, *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., 2003, *Teori Sosiologi Modern (Terjemahan dari Alimandan)*. Jakarta: Prenada Media.
- Shiraishi, Aiko Kurasawa, 1988, *Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial: Penyerahan Padi Secara Paksa dan Pemberontakan Petani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sing, Rajendra, 2001, *Social Movement, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi/Thousand Oaks/London: Sage Publications.
- Smelser, Neil J., 1962, *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- _____, 1981, *Sociology*. Englewood Cliffs, New Best: Prentice-Hall Inc.
- Strauss, A. Dan Corbin, J., 1998, *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Edisi ke-2. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi, Edisi Kedua*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Tilly, Charles, 1978, *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company.
- Turner, Jonathan Ralph H, 1991, *The Structure of Sociological Theory: First Edition*. Wadsworth Publishing Company.
- _____, 1998, *The Structure of Sociological Theory*. Sixth Edition. Wadsworth Publishing Company.

Artikel/Jurnal:

- Cable, Sherry dan Degutis, Beth, 1997, Movements Outcomes and Dimensions of Social Change: the Multiple Effects of Local Mobilizations. *Current Sociology*, Vol. 45 Nomor 3 Juli 1997, SAGE Publications, halaman 121–135.
- Haber, Paul Lawrence, 1997, Social Movements and Socio-Political Change in Latin America. *Current Sociology*, Januari 1997, Vol. 45, SAGE Publicationsment, halaman 121–140.

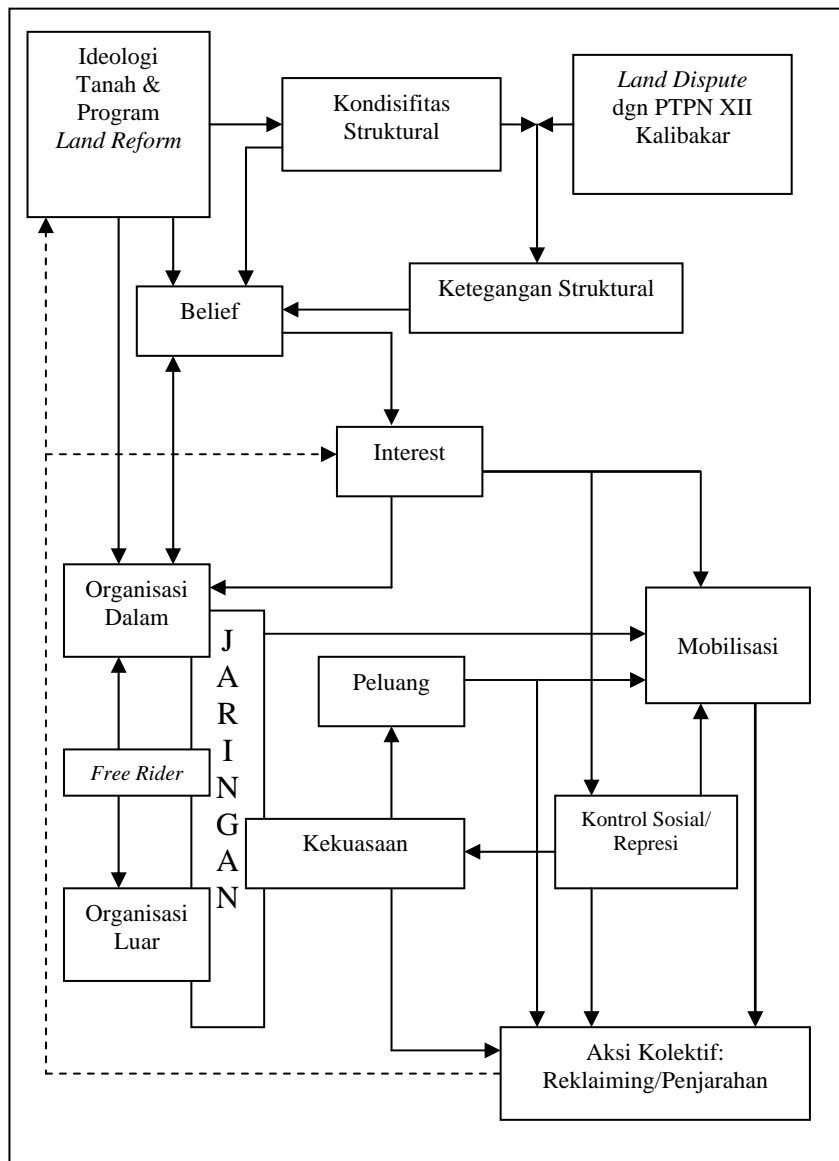
- Jaeyeol, Yee, 2000, Network Analysis of Solidarity Ties among Social Movement Organizations. *Korea Journal/Autumn*, 2000, halaman 58–94.
- Keun, Song Ho, 2000, Analysis of Participants in the New Social Movements in Korea: Mobilization and Network. *Korea Journal/autumn*, 2000, halaman 95–130.
- Martin, Peter dan Halpin, Darren, 1998, Landcare as a Politically Relevant New Social Movement ?, *Journal of Rural Studies*, Vol. 14, Elsevier Science, halaman 445–457.
- Omvedt, Gail, 1994, Peasants, Dalits and Women: Democracy and India's New Social Movement, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 24 No. 1, 1994, halaman 35–48.
- Rosenthal, Naomi; Fingrutd, Meryl; dan Ethier, Mchele, et.al., 1985, Social Movements and Network Analysis: A Case Study of Nineteenth-Century Women's Reform in New York State. *American Journal of Sociology*, Vol. 90 Nomor 5 Maret 1985, halaman 1022–1054.
- Tilly, Charles, 1998, Social Movements and (all sors of) other Political Interactions-Local, National, and International-Including Identities, *Theory and Society* 27:453–480, 1998.

Website:

- Gould, Roger V., 2000, *Why Do Networks Matter? Rationalist and Structuralist Interpretations*, paper dalam Workshop tentang "Social Movement Analysis: The Network Perspective" di Loch Lomond Skotlandia tanggal 22–25 Juni 200, <http://www.nd.edu/~dmyers/lomond/passy-pdf>, (diunduh pada tanggal 27 Nopember 2001).
- Molyneux, Maxine, 1998, *Analysing Women's Movements*, Development and Change Vol. 29 (1998), 219–245.

Lampiran:

Model Gerakan Sosial Petani Kalibakar



Keterangan: Dikembangkan atas dasar hasil konvergensi antara Teori Smelser (1962) dan Tilly (1978) dalam kasus Kalibakar.